

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, (2018). *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andriyani, R. (2021). "Konversi Hak Eigendom dalam Sistem Pertanahan Nasional." *Jurnal Hukum IUS*.
- Boedi Harsono, (2013), *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Elza Syarief, (2014). *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Sumber lainnya

- Ahlanissa, M. P., & Aidi, Z. (2023). Ahlanissa, M. P., & Aidi, Z. (2023). Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Bekas Eigendom Verponding dalam Sengketa Kepemilikan Tanah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2081–2092. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3489> Akibat Hukum Bagi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2081–2092.
- Bakri, M., & Kertha, P. (n.d.). *Unifikasi dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi dalam UUPA)*.
- Dilapanga, R. A. (2017). Sertifikat Kepemilikan atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. *Jurnal Lex Crimen*, (No. 5), 138.
- Friedrich Carl Joachim. (2017). *Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*.
- Keputusan Presiden, Nomor 32 1979 Tentang Pokok-Pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru Atas tanah asal konversi hak-hak barat
- M Soetojo. (2018). *Undang-Undang Pokok Agraria dalam pelaksanaan landreform (Staf Pengu)*.
- Nadila, I. (2023). *Filsafat hukum mengajarkan kemanfaatan hukum*.
- Natasha, S. (2018). Penghapusan Pasal Penggolongan Penduduk Dan Aturan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Unifikasi Hukum. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 167–192. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.107>
- Nurfaqih. (2020). "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior:

- Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”. *Legislasi Indonesia*, 16(No. 3), hlm. 312.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 (1979) Tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru Atas tanah Asal konversi hak-hak barat
- Peraturan Pemerintah, Pub. L. Nomor 24 (1997) Tentang Pendaftaran tanah
- Peraturan Pemerintah, Pub. L. Nomor 18 (2021) Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Syukur, A. N., Nuraini, H., & Yusmiati, Y. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Warga Dago Elos Melawan Keluarga Muller: Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 109 Pk/Pdt/2022. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(1), 51–72. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1085>
- Ujan, A. A. (2018). *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Kanisiusblac.
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3.